

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Setelah kurang lebih 40 tahun menjadi bagian dari Uni Eropa, pada tahun 2016 dunia dikejutkan dengan pernyataan Inggris mengenai status keanggotaannya dalam Uni Eropa. Inggris menyatakan keinginannya untuk keluar dari Uni Eropa melalui hasil sebuah referendum yang kemudian dikenal dengan Referendum *Britain Exit*. Melalui hasil referendum tersebut, sebanyak 51,9% (1p7.410.742) memilih agar Inggris keluar dari Uni Eropa dan 48,1% (16.141.241) memilih agar Inggris tetap di Uni Eropa. Hasil ini mengejutkan berbagai pihak dan menyebabkan timbulnya berbagai spekulasi alasan terkait faktor yang menyebabkan rakyat Inggris lebih memilih untuk keluar dari Uni Eropa.<sup>1</sup>

*Britain Exit* sering kali dipandang dalam persepektif ekonomi. Namun dalam penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana gerakan perempuan yang mendukung kesetaraan gender menanggapi fenomena *Britain Exit*. Keluarnya Inggris dari Uni Eropa setelah kurang lebih 40 tahun menjadi anggota dan terlibat dalam berbagai kesepakatan dan aturan di Uni Eropa, maka secara tidak langsung hal tersebut tentu akan berpengaruh terhadap perubahan-perubahan kebijakan Inggris baik kebijakan dalam negeri maupun luar negeri.

Terdapat banyak penelitian dan publikasi yang menunjukkan data mengenai konsekuensi yang ditimbulkan dari Referendum *Britain Exit* dari perspektif, keamanan, imigrasi, pertahanan dan perdagangan. Namun, Referendum *Britain*

---

<sup>1</sup> Endy Anatta Pammasena, *Kepentingan Inggris Keluar dari Keanggotaan Uni Eropa Tahun 2016*, JOM FISIP, Vol. 4, No. 2, Oktober 2017, 1-16, hal. 2.

*Exit* juga akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat Inggris pada umumnya. Hal ini yang kemudian memunculkan pro dan kontra dari Referendum *Britain Exit* itu sendiri. Hingga saat ini, masyarakat Inggris masih terbelah menjadi dua kubu, yaitu mereka yang menginginkan Brexit tetap terjadi sesuai dengan hasil referendum, dan mereka yang ingin Inggris untuk memberikan masyarakat kesempatan untuk melaksanakan referendum kembali dengan alasan bahwa Inggris akan lebih baik bersama Uni Eropa.

Salah satu gerakan yang aktif untuk menolak referendum *Britain Exit* ini adalah gerakan perempuan. Terdapat berbagai gerakan perempuan di Inggris maupun di Uni Eropa yang menyatakan bahwa keluarnya Inggris dari Uni Eropa akan menyerang kaum perempuan. Hal ini dikarenakan, selama ini perempuan-perempuan negara anggota Uni Eropa termasuk Inggris telah terbantu dengan berbagai aturan yang diterapkan Uni Eropa kepada negara-negara anggotanya. Menjadi bagian dari salah satu institusi yang dianggap menjunjung tinggi kesetaraan dan hak-hak perempuan inilah yang ditakutkan akan hilang bersamaan dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa.

Hal ini sesuai dengan data *European Commission*, setelah terbentuk pada tahun 1992, perkembangan kesetaraan gender dalam Uni Eropa terus mengalami peningkatan pesat pada abad 21. Saat ini Uni Eropa dapat dikatakan mempunyai tingkat kesetaraan gender yang tinggi. Presiden Komisi Eropa pada tahun 2014, Jean-Claude Juncker, mengatakan kemajuan kesetaraan gender di Uni Eropa mampu melebihi daerah lain dan menjadi contoh bagi negara-negara lain, dalam pidato nya:

*“Europe is a piooneer of gender equality and that is something we should be proud of. Be it in employment, occupation, vocational training, social security or access to goods and services: women and men have to be treated equally. That is the law.”*<sup>2</sup>

Pada laporan ketidaksetaraan gender dunia UNDP pada tahun 2015, Eropa telah mampu jauh berada diatas rata-rata indeks ketidaksetaraan gender dunia dan menjadi peringkat teratas dengan angka kesenjangan 0,279 sedangkan rata-rata dunia masih 0,443. Indeks ini dihitung berdasarkan indikator dari sektor-sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik.<sup>3</sup>

Adapun dalam penelitian ini terdapat beberapa gerakan yang aktif untuk menyatakan penolakan mereka terhadap Brexit, yaitu, *Women for Europe*, *Women for People’s Vote*, *Women’s March London*, dan *Women’s Budget Group*. Gerakan perempuan tersebut menyatakan penolakan mereka karena mereka tidak menginginkan fasilitas-fasilitas yang selama ini diberikan oleh Uni Eropa kepada perempuan melemah atau bahkan hilang bersamaan dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa.

Berdasarkan pemaparan diatas terdapat beberapa hal yang membuat penelitian ini dianggap menarik. *Pertama*, walaupun Uni Eropa disebut menjunjung tinggi kesetaraan, kesetaraan tersebut kurang tercermin dalam perdebatan terkait Referendum Britain Exit di Inggris yang dianggap gagal untuk menyalurkan aspirasi dan suara perempuan. Sehingga, kampanye maupun keputusan yang

---

<sup>2</sup> Sri Asfarina Murti, 2018, *Advokasi Feminist dan Regime Gender Dalam Mencapai Kesetaraan Gender di Uni Eropa*, Yogyakarta: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hal. 4.

<sup>3</sup> Ibid.

dilakukan kurang menyuarakan isu-isu berbasis kesetaraan dan perempuan. Porsi yang didapat laki-laki dalam perdebatan terkait referendum Britain Exit di parlemen lebih besar daripada perempuan. Selain itu, laki-laki juga mendominasi diskusi siaran televisi yang berkaitan dengan politik Inggris. Sehingga peran perempuan yang justru akan terkena konsekuensinya dapat dikatakan kurang dalam rangkaian kampanye dan keputusan referendum Britain Exit.

*Kedua*, penelitian ini ingin melihat Uni Eropa sebagai aktor gender yang mampu memberikan keuntungan terhadap kehidupan perempuan dan hak-hak kesetaraan di Inggris. Selama ini masyarakat Inggris, terutama perempuan menikmati berbagai keuntungan dalam hal *gender mainstreaming* dengan undang-undang yang dipatuhi Inggris selama menjadi anggota di dalam Uni Eropa. Keluarnya Inggris, tentu akan membawa perubahan terhadap undang-undang tersebut.

*Ketiga*, hal lain yang menarik untuk diteliti adalah bagaimana gerakan-gerakan perempuan di Inggris yang tidak hanya menyuarakan suaranya melalui media. Namun mereka mampu untuk mengeluarkan kritik mereka terhadap kegagalan referendum Britain Exit, terutama terkait konsekuensinya terhadap perempuan. Gerakan-gerakan perempuan ini juga mampu memobilisasi masyarakat melalui *march* atau demonstrasi yang mereka lakukan sebagai bentuk protes mereka terhadap referendum Britain Exit. Maka dari itu penelitian ini dianggap menarik dan membuat referendum Britain Exit tidak hanya dapat dipandang menggunakan ukuran-ukuran ekonomi saja, tapi juga dapat

menggunakan ukuran-ukuran social terutama yang berkaitan dengan hak-hak kesetaraan gender yang selama ini dinikmati perempuan-perempuan di Inggris.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat yaitu, ***Bagaimana strategi kampanye penolakan gerakan perempuan di Inggris terhadap referendum Britain Exit?***

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberikan informasi kepada pembaca mengenai sudut pandang lain dalam melihat Britain Exit, yaitu dari sudut pandang perempuan.
2. Untuk mengetahui dan memberikan informasi kepada pembaca mengenai reaksi perempuan-perempuan Inggris terhadap referendum Brexit.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai manfaat teoritis.

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Referendum Britain Exit atau kesetaraan gender serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan analisa terkait Referendum Britain Exit dan Uni Eropa yang terus berkembang.

#### 1.4 Penelitian Terdahulu

Peneliti dalam menganalisa kasus ini menggunakan kajian-kajian terkait penelitian terdahulu yang juga membahas seputar Brexit dan perempuan. Penelitian pertama terdapat dalam Jurnal Hubungan Internasional Volume 5 Nomor 3 oleh Indah Sri Lestari yang berjudul “*Penarikan Diri Inggris dari Uni Eropa tahun 2016*”. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan mengenai kronologi referendum Brexit hingga alasan dan kepentingan Inggris yang memutuskan untuk meninggalkan Uni Eropa, serta dampak yang ditimbulkan oleh Brexit terhadap sektor ekonomi.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini persamaan yang dimiliki adalah kedua penelitian membahas isu yang sama yaitu isu referendum Brexit, sedangkan perbedaannya dapat dilihat dari fokusnya, di mana penelitian Indah Sri Lestari menggunakan Konsep regionalisme untuk membahas kepentingan Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa dan dampak-dampak dari referendum Brexit terhadap perekonomian.

Penelitian kedua ditemukan dalam jurnal Universitas Cambridge sektor Social Policy and Society Volume 17, No 2 oleh Roberta Guerrina dan Annick Masselot dengan judul “*Walking into the Footprint of EU Law: Unpacking the Gendered Consequences*”. Peneliti menyatakan bahwa perempuan-perempuan di United Kingdom sangat terbantu melalui keanggotaan United Kingdom dalam Uni Eropa maupun EEC. Hal ini dikarenakan banyak hak-hak kesetaraan yang disepakati di dalamnya sehingga menguntungkan bagi kaum perempuan. Fokus peneliti dalam jurnal ini adalah membahas bagaimana untuk menciptakan lingkungan yang ramah

---

<sup>4</sup> Indah Sri Lestari, Op. Cit., hal. 1031.

terhadap hak-hak keibuan serta kesetaraan gender pasca Brexit walaupun fokus pemerintah Inggris cenderung kepada penguatan dalam bidang ekonomi. Berdasarkan peneliti, semakin besar ketergantungan United Kingdom terhadap ketentuan Uni Eropa dalam legislasi nasionalnya, semakin besar dampak yang ditimbulkan oleh Brexit.<sup>5</sup>

Persamaan yang ditemukan dalam penelitian Roberta Guerrina dan Annick Masselot adalah kedua penelitian memandang Brexit dari sudut pandang gender terutama perempuan. Namun perbedaannya adalah, penelitian Roberta Guerrina dan Annick Masselot lebih menekankan pada konsekuensi berbasis gender yang ditimbulkan dari Brexit, sementara penelitian ini lebih berfokus untuk menganalisa penolakan gerakan perempuan terhadap referendum Britain Exit.

Penelitian ketiga ditemukan dalam *The Brexit Vote: a divided nation, a divided continent* oleh Sarah B. Hobolt. Dalam penelitian ini peneliti mengatakan bahwa keputusan referendum Brexit bukanlah suatu kabar yang dapat dianggap mengejutkan pasalnya publik Inggris sudah sejak lama meragukan kerja Uni Eropa semenjak Inggris bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 1973. Selain itu gencarnya kampanye *anti-establishment* yang dibuat oleh pihak Leave (mendukung keluarnya Inggris dari Uni Eropa) dapat secara efektif menyebar di kalangan masyarakat terutama terkait imigrasi, kurangnya peluang ekonomi, dan kekecewaan terhadap politikus. Keraguan masyarakat Inggris terhadap Uni Eropa,

---

<sup>5</sup> Roberta Guerrina dan Annick Masselot, *Walking into the Footprint of EU Law: Unpacking the Gendered Consequences*, Social Policy Society, Volume 17, Nomor 2, Mei 2018: 319-330, hal 319.

berdasarkan peneliti disebabkan oleh kampanye anti-immigration dan anti-establishment.<sup>6</sup>

Perbedaan yang ditemukan dalam penelitian *The Brexit Vote: a divided nation, a divided continent* adalah fokus penelitian yang lebih berfokus pada dampak Brexit terhadap perpecahan di masyarakat Inggris dengan adanya kampanye kompetitif dari kubu Leave dan kubu Remain. Namun kedua penelitian, mengkaji isu yang sama yaitu Brexit, hanya saja dari sudut pandang yang berbeda.

Penelitian keempat oleh Michael Ford yang berjudul “*The Impact of Brexit on Labour Law*”. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisa mekanisme legal yang akan ditempuh oleh United Kingdom untuk menjamin hak-hak pekerjaanya. Dalam penelitian ini juga dijabarkan berbagai aturan yang menguntungkan para pekerja di Inggris apabila Inggris memutuskan untuk “remain” dalam keanggotaan Uni Eropa, seperti UK Equality Act 2010 terkait kesetaraan dalam upah, akses dan perlakuan dalam lingkungan kerja.<sup>7</sup> Persamaan penelitian Michael Ford dan peneliti terletak pada cara keduanya berupaya untuk melihat Brexit dari sudut pandang yang berbeda. Hanya saja, apabila penelitian Michael Ford lebih cenderung untuk mengupas *Labour Law*, penelitian ini cenderung lebih membahas *Equality Law*.

Penelitian kelima ditemukan dalam “*Gender, Power and Left Politics: From Feminization to Feminisation*” oleh Dean J dan Maiguashca. Penelitian ini membahas mengenai tantangan yang harus dihadapi Inggris pasca Brexit. Peneliti

---

<sup>6</sup> Sara B. Hobolt, *The Brexit Vote: a divided nation, a divided continent*, Journal of European Public Policy, Volume 23, Nomor 9, 2016: 1259-1277, hal 1260.

<sup>7</sup> Michael Ford, *The Impact of Brexit on UK Labour Law*, International Journal of Comparative Labour Law, Volume 32, No 4, 2016: 473-496, hal 476.



menggunakan kata berbahaya untuk menggambarkan situasi yang terjadi akibat keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Berdasarkan penelitian ini dinyatakan bahwa referendum Brexit disebutkan sebagai sebuah situasi di mana politik Inggris seringkali diwarnai oleh rasisme dan misoginis. Maka dari itu peneliti melalui penelitian ini berusaha menyampaikan bahwa pemerintah perlu mengkaji ulang identitas politik Inggris yang seharusnya mengedepankan perlawanan terhadap diskriminasi ras maupun gender pasca Brexit.<sup>8</sup>

Persamaan yang ditemukan adalah pada penggunaan kerangka teori, penelitian Dean J dan Maiguashca juga menggunakan kerangka Teori Feminisme dalam menganalisa kasusnya, hanya saja perbedaan terlihat dari bagaimana penelitian Dean J dan Maiguashca tidak hanya berfokus pada referendum Brexit tapi kepada Feminization.

Penelitian terakhir adalah penelitian penulis dengan judul “*Kampanye Penolakan Gerakan Perempuan di Inggris Terhadap Referendum Britain Exit*”, dalam penelitian ini penulis memandang Britain Exit bukan lagi sebagai suatu isu ekonomi melainkan dari sudut pandang feminis. Britain Exit dilihat sebagai suatu fenomena yang dapat mengancam hak-hak kesetaraan yang selama ini sudah dinikmati masyarakat Inggris seiring dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Penelitian ini menekankan pada bagaimana strategi gerakan perempuan di Inggris dalam menolak hasil dan proses dari referendum Britain Exit.

---

<sup>8</sup> Dean J dan Maguisha B, *Gender, Power and Left Politics: From Feminization to Feminization*, Politics and Gender, Volume 14, No 3, 2018: 376-406, hal 383.

**Tabel 1.1. Posisi Penelitian**

Nama dan Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
Indah Sri Lestari berjudul <b>Penarikan Diri Inggris dari Uni Eropa tahun 2016</b>	Metode Eksplanatif-analisis  Konsep Regionalisme	Adapun alasan Inggris dalam penarikan dirinya di Uni Eropa berkaitan dengan permasalahan ekonomi berupa rasa keberatan atas anggaran Uni Eropa yang terlalu besar. Selain itu permasalahan Imigran dan Zona Euro juga turut mempengaruhi preferensi masyarakat untuk memilih melepaskan diri dari mekanisme Uni Eropa.
Roberta Guerrina dan Annick Masselot dengan judul <b>Walking into the Footprint of EU Law: Unpacking the Gendered Consequences</b>	Metode Deskriptif  Konsep Gender	Fokus pemerintah Inggris yang cenderung mengarah pada penguatan sektor ekonomi dapat merugikan perempuan dan pejuang-pejuang hak kesetaraan. Sehingga akan sulit untuk mewujudkan lingkungan yang ramah akan kesetaraan dan hak-hak perempuan.
Sarah B. Hobolt dengan judul <b>The Brexit Vote: a divided nation, a divided continent</b>	Metode Deskriptif  Teori <i>Voting Behaviour</i>	Faktor yang memecah belah masyarakat akibat pemungutan suara terhadap Brexit adalah isu mengenai imigran yang bersangkutan dengan hilangnya identitas nasional. Masalah inilah yang menjadi sumber perdebatan Leave dan Remain referendum Brexit.
Michael Ford dengan judul <b>The Impact of Brexit on Labour Law</b>	Metode Deskriptif  Hukum Tenaga Kerja	Dengan terjadinya Brexit maka tentu akan sangat berpengaruh terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan di Inggris. Perubahan-perubahan yang dibentuk Inggris pasca Brexit, terutama terkait hak

		ketenagakerjaan baru akan dapat berjalan kurang lebih pada tahun 2020, apabila dilihat dari banyaknya perubahan yang perlu dihadapi Inggris pasca Brexit
Dean J dan Maiguashca dengan judul <b>Gender, Power and Left Politics: From Feminization to Feminization</b>	Metode Deskriptif Teori Feminisme	Pemerintah Inggris mengkaji kembali politik Inggris yang seharusnya ramah terhadap kesetaraan serta mengedepankan perlawanan terhadap diskriminasi ras maupun gender pasca Brexit.
Basyarani Annisa R. Uwar dengan judul <b>Kampanye Penolakan Gerakan Perempuan di Inggris Terhadap Referendum Britain Exit</b>	Metode Deskriptif Konsep Civil Society Konsep Kesetaraan Gender	Asumsi dasar penulis adalah referendum brexit dipandang sebagai agenda sexist karena keputusan referendum tersebut diambil dari parlemen yang didominasi lelaki tanpa mempertimbangkan hak-hak kesetaraan yang akan hilang bersamaan dengan mundurnya Inggris dari Uni Eropa.

## 1.5 Kerangka Teori

### 1.5.1 Konsep *Civil Society*

Konsep *civil society* sangat melekat dengan sejarah Eropa. Dalam tradisi Eropa sebelum abad ke-18, muncul berbagai istilah *civil society*, seperti *koinonia politike* dalam bahasa Yunani, *societas civilis* dalam bahasa Latin, *societe civile* dalam bahasa Perancis, dan *burgerliche Gesellschaft* dalam bahasa Jerman,

semuanya mensinonimkan pengertian *civil society* dengan negara.<sup>9</sup> *Civil Society* mencakup beragam organisasi sukarela yang bersaing dan berorientasi pada kepentingan tertentu. Aktor yang terlibat asosiasi non-state dan asosiasi yang murni tanpa didorong oleh kepentingan tertentu, mandiri terorganisir, dan bergerak di ruang publik. *Civil society* merupakan asosiasi yang independen, namun berorientasi dan berinteraksi dengan negara dan politik.

Hal yang sangat melekat pada *civil society* adalah kesukarelaan dan keterbukaan, yang berarti *civil society* mampu bergerak menyuarakan visi, misi dan kepentingan bersama mereka sebagai suatu asosiasi tanpa ketergantungan. Keterbukaan dalam arti adanya interaksi yang terbuka antar asosiasi yang terlibat dalam ruang publik untuk berdialog dan mendapatkan kepentingan masing-masing. Adapun menurut AS Hikam terdapat dua fungsi dari *civil society* yaitu sebagai alat dan sebagai tujuan. Sebagai alat berarti *civil society* berperan untuk melakukan *check and balance*, sedangkan sebagai tujuan berarti mengawasi konflik-konflik sosial secara damai dan institusional.<sup>10</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi dari *civil society* adalah memperkuat peran masyarakat apabila berhadapan dengan negara.

John Keane menyatakan bahwa *civil society* adalah mereka yang memberikan perlakuan khusus terhadap kebebasan atas kekerasan dan permusuhan bagi setiap individu.<sup>11</sup> Keane menyatakan bahwa konsep *civil society* telah digunakan

---

<sup>9</sup> Bachtiar Alam, *Antropologi dan Civil Society: Pendekatan Teori Kebudayaan*, ANTROPOLOGI INDONESIA Vol. 30, No. 2, 2006, hal. 194.

<sup>10</sup> Muhammad A.S Hikam, 1999, *Islam, Demokratisasi, dan Pemberdayaan Civil Society*, Jakarta: Penerbit Erlangga, hal 85.

<sup>11</sup> Andrea DeJonge (auth.), Helmut K. Anheier, Stefan Toepler (eds.), 2010, *International Encyclopedia of Civil Society*, New York: Springer, hal 461.

dalam teori politik liberal demokratis untuk mendefinisikan ruang yang ada antara negara dan masyarakat dalam demokrasi yang identik dengan aktivitas politik atau mobilisasi masyarakat di luar ruang pemerintahan. Sehingga, *civil society* juga dapat dipahami sebagai resistensi politik terhadap perilaku negara oleh masyarakat demokratis.<sup>12</sup>

Terdapat beberapa karakteristik yang identik dari suatu civil society, yaitu *Free public sphere*, Demokratis, Toleransi, Pluralisme dan Keadilan Sosial. Pertama, *free public sphere* berarti masyarakat dapat melakukan kegiatan secara merdeka dalam mengemukakan pendapat, berserikat, berkumpul dan mempublikasikan informasi kepada publik. Kedua, demokratis yang berarti adanya pola hubungan interaksi yang tidak mempertimbangkan suku, ras dan agama. Ketiga, toleransi dalam civil society menurut Azyumardi Azra adanya penerimaan pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda secara sukarela. Keempat, karakteristik pluralisme ini merupakan prasyarat bagi tegaknya civil society yang berarti penciptaan tatanan kehidupan yang saling menghargai dan menghormati keragaman dalam konteks keseharian. Terakhir, keadilan sosial yang berarti adanya pembagian yang proporsional terkait hak dan kewajiban.<sup>13</sup>

*Civil Society* dapat diartikan sebagai organisasi *self-generated*, *non-state self-propelled*, yang mengatur perilaku warga negara secara kolektif sesuai dengan kehendak mereka dan di sisi lain mengendalikan pemerintah sesuai dengan

---

<sup>12</sup> Einhorn, B., & Sever, C, *Gender and Civil Society in Central and Eastern Europe. International Feminist Journal of Politics*, Vol. 5, No. 2, 2003: 163–190, hal 167

<sup>13</sup> Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA, 2005, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media, hal. 247-250.

kepentingan dan keinginan mereka. *Civil society* berfungsi sebagai perantara di antara negara dan masyarakat serta mewakili tujuan-tujuan normatif dan kepentingan bersama seperti perlindungan lingkungan, kesejahteraan anak, perkembangan perempuan, disabilitas dan mental, perlindungan hak asasi manusia dan sebagainya.<sup>14</sup>

Apabila dilihat dari pemaparan diatas maka gerakan perempuan di Inggris tergolong sebagai *civil society* dikarenakan gerakan perempuan Inggris menyuarkan aspirasi mereka dan juga meminta adanya perubahan dengan dilakukannya referendum ulang terkait keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Selain itu mereka juga menyatakan bahwa mereka adalah *representative* dari wanita yang suara dan pendapatnya dianggap kurang terlibat dalam perdebatan dan pembicaraan isu Britain Exit. Dalam hal ini gerakan perempuan di Inggris. Melekatnya aspek kesetaraan dalam gerakan perempuan ini yang berarti tidak ada paksaan bagi masyarakat Inggris untuk datang dan berpartisipasi dalam aksi-aksi yang mereka lakukan juga mencerminkan salah satu sifat gerakan perempuan Inggris sebagai bagian daripada civil society.

### 1.5.2 Kesetaraan Gender

Menurut J.S Mill, apabila suatu masyarakat telah menolak suatu praktik perbudakan, maka praktik ketidaksetaraan seharusnya sudah tidak dilanggengkan. Terdapat beberapa alasan mengapa kesetaraan itu perlu diwujudkan dalam masyarakat, *Pertama*, pada masa itu, praktik-praktik perbudakan sudah ditolak dan dilarang, maka seharusnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan juga sudah

---

<sup>14</sup> Sharma, L. N. *Concept, Structure and Functions of Civil Society*, Indian Journal of Public Administration, Vol. LXJ, No. 4, 2015: OCTOBER-DECEMBER, hal. 1.

menjadi sesuatu yang tidak dapat diterima di masyarakat. *Kedua*, secara alamiah perempuan dianggap berkedudukan dibawah laki-laki. Hal ini kemudian ditolak oleh J.S. Mill yang menyatakan bahwa sifat alamiah manusia seharusnya berubah seiring dengan perkembangan lingkungan sosial. Mill juga menyatakan walaupun perempuan sering dianggap sangat berbeda dengan laki-laki. Namun faktanya, banyak perempuan yang mampu menunjukkan bakat dan kecerdasan yang luar biasa dalam kepemimpinan politik seperti Ratu-ratu di Eropa dan Putri-putri Hindu.<sup>15</sup>

Tidak hanya itu, *Ketiga*, Mill juga menolak pernyataan bahwa tidak ada yang salah dari ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, karena perempuan dianggap menerima hal tersebut. Mill tentu membantah hal ini dengan menegaskan bahwa banyak perempuan yang menulis penolakannya terhadap ketidaksetaraan dan lebih dari 100 perempuan di London berdemonstrasi menuntut untuk mendapatkan hak pilih. *Keempat*, argument terakhir menegaskan bahwa Mill menolak gagasan lelaki sebagai pengambil keputusan terbaik dalam keluarga. Hal ini dikarenakan menurut Mill bahwa dalam sebuah pernikahan, kedua pasangan telah dewasa, maka tidak ada alasan untuk memberikan kekuasaan lebih terkait keputusan keluarga hanya pada suami.<sup>16</sup>

Terdapat empat manfaat kesetaraan sosial bagi perempuan: (1) keluarga tidak lagi didominasi oleh kekuasaan suami atau sekolah dispotik, (2) dua kali lipat kemampuan masa yang menyebabkan masyarakat memiliki lebih banyak lagi

---

<sup>15</sup> Kapil Kumar, 2003, *Western Political Thought (From Plato to Marx)*, New Delhi: Indira Gandhi National Open University, hal 154.

<sup>16</sup> Ibid.

tenaga kesehatan, mesin dan pengajar dari golongan perempuan, (3) adanya hak kesetaraan bagi perempuan dapat meminimalisir kemungkinan perempuan untuk bangkit dan melawan, sehingga hal ini berarti kesetaraan akan memiliki pengaruh yang lebih baik pada masyarakat, (4) dan tentunya, hak kesetaraan akan meningkatkan kebahagiaan.<sup>17</sup>

Konsep Kesetaran Gender ini dianggap dapat mendukung penelitian ini karena penelitian ini akan membahas bagaimana respon perempuan-perempuan Inggris yang selama ini menikmati hak-hak kesetaraan seperti *equal pay*, *maternity rights* dengan bergabungnya Inggris di dalam Uni Eropa terancam akan kehilangan keuntungan tersebut setelah Referendum Brexit. Konsep ini juga dianggap sesuai untuk membantu menjelaskan tuntutan para gerakan-gerakan perempuan Inggris yang berbasis hak-hak kesetaraan.

## **1.6 Metodologi Penelitian**

### **1.6.1 Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, di mana penulis berperan menggambarkan respon gerakan perempuan di Inggris terhadap Referendum Britain Exit. Menurut Mohtar Mas'oed, penelitian deskriptif adalah penelitian yang berperan untuk menjawab pertanyaan, siapa, apa, di mana, kapan, atau berapa, jadi merupakan peran untuk melaporkan apa yang terjadi.

### **1.6.2 Teknik Analisa Data**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, teknik analisa data yang digunakan yaitu dengan mengumpulkan segala data dan informasi ssebagai fakta

---

<sup>17</sup> Ibid, hal. 155.



fakta yang kemudian akan saling dikaitkan dan dibuktikan dengan fenomena kasus yang ada sehingga dapat menemukan jawaban dari penelitian.

### **1.6.3 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini didukung dan diperoleh dari studi kepustakaan seperti data dan sumber-sumber bacaan seperti buku, media online serta wawancara dengan subjek penelitian yaitu Cathy Wigley perwakilan dari gerakan perempuan *Women for Europe*. Subjek penelitian dipilih karena Cathy Wigley merupakan pihak yang terlibat dalam upaya penolakan Britain Exit dari gerakan Perempuan. Pengumpulan data tersebut dapat membantu peneliti dalam memperkuat analisa dan menjelaskan fakta yang terukur dari kasus yang telah dipilih sehingga peneliti dapat menentukan argumentasi dari data dan informasi yang telah disimpulkan.

### **1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian**

#### **a. Batasan Waktu**

Dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti data pada tahun 2016 yang merupakan tahun di mana Inggris menggelar referendum untuk mempertimbangkan keanggotaannya dalam Uni Eropa hingga proses Britain Exit pada tahun 2019.

#### **b. Batasan Materi**

Adapun ruang lingkup materi dalam penelitian ini adalah pada reaksi atau respon gerakan-gerakan perempuan dan pejuang hak-hak kesetaraan terhadap referendum Britain Exit.

## 1.7 . Sistematika Penulisan

Penelitian akan terbagi dalam beberapa Bab dan Sub Bab yang disesuaikan dengan urutan kerangka pemikiran, sebagai berikut :

**BAB I** menjelaskan latar belakang masalah dan topik yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam bagian ini juga dijelaskan kerangka penelitian seperti rumusan masalah, tujuan dan manfaat, penelitian terdahulu, konsep yang digunakan yaitu Konsep Civil Society dan Konsep Kesetaraan Gender, metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, teknik analisa data, teknik pengumpulan data dan ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II** membahas bagaimana dinamika yang terjadi di dalam Inggris semenjak Inggris bergabung dalam Uni Eropa hingga menggelar referendum untuk memutuskan keanggotaannya di dalam Uni Eropa. Dalam bagian ini juga dijelaskan masa kepemimpinan Perdana Menteri yang bertanggung jawab terhadap proses Britain Exit itu sendiri yaitu David Cameron, Theresa May, hingga Boris Johnson.

**BAB III** membahas kampanye-kampanye penolakan yang dilakukan oleh gerakan perempuan di Inggris terhadap referendum Britain Exit. Dalam melakukan penolakan terhadap Britain Exit, gerakan perempuan di Inggris mempunyai beberapa strategi yaitu konvensional dan non konvensional. Strategi konvensional

mencakup kampanye penolakan melalui demonstrasi, sedangkan kampanye non konvensional mencakup penolakan yang dilakukan melalui media masa, media sosial dan juga membangun jaringan sebagai strategi mereka untuk menyampaikan aspirasi dan suara penolakan gerakan perempuan di Inggris agar dapat tersampaikan.

**BAB IV** menjelaskan kesimpulan yang didasarkan pada hasil penelitian dan juga saran untuk penelitian selanjutnya.

